

**ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP  
FUNGSI DEWAN PENGAWAS KPK DALAM  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Analisis Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK)**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
Nawir  
NIM: C93216143**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Prodi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nawir  
NIM : C93216143  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Publik Islam  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Juduk : Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Fungsi Dewan Pengawas KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Fungsi Dewan Pengawas KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK)". Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar dan ditemukan pelanggaran atas karya skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa cabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Surabaya, 01 Desember 2020  
Yang membuat pernyataan



Nawir  
NIM: C93216143

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : Nawir  
NIM : C93216143  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul : Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Fungsi Dewan Pengawas KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK)

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 01 Desember 2020  
Menyetujui  
Pembimbing,



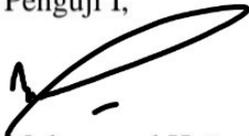
Muhammad Hatta S, Ag, MHI  
NIP: 197110262007011012

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nawir NIM. C93216143 telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14, bulan Januari, tahun 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Mohammad Hatta, M.Ag  
NIP. 197110262007011012

Penguji II,



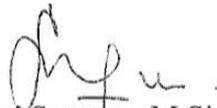
Dr. Hj. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag  
NIP. 197904162006042002

Penguji III,



A. Mufthi Khazin, MHI.  
NIP. 197303132009011004

Penguji IV,



Novi Sopwan, M.Si.  
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 14 Januari 2021 M

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Prof. Dr. H. Masruhan M.Ag  
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uin-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NAWIR  
NIM : C93216143  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam  
E-mail address : sujidewantara@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP FUNGSI DEWAN  
PENGAWAS KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Analisis Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Kpk)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Madura, 02 April 2021  
Penulis

NAWIR









































































































































Pimpinan KPK periode pertama (2003-2007). Tahun 2008, diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Pesero) berdasarkan Keputusan Meneg BUMN. Pada Juni 2015 hingga Desember 2019, Tumpak menjabat Komisaris Utama PT Pelindo 2 (Pesero) sebelumnya akhirnya dipilih oleh presiden untuk menduduki posisi pejabat sementara (Plt) Pimpinan KPK pada tahun 2009-2010.

Atas pengabdianya, Ia pernah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya XX Tahun 1997, Satya Lencana Karya Satya XXX 2003 dan Bintang Mahaputera Utama tahun 2009

## 2. Artidjo Alkostar (Anggota Dewan Pengawas)

Pria kelahiran Situbondo, 22 Mei 1948 ini memulai karirnya sejak mendapat gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) pada 1976. Sejak itu, ia mendedikasikan diri menjadi dosen di universitas yang sama dan menjadi advokat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta sejak 1976-2000 hingga akhirnya ia dipilih menjadi Direktur LBH Yogyakarta pada 1989.

Pada 1989, Artidjo berangkat ke New York, Amerika Serikat untuk mengikuti pelatihan khusus pengacara bidang Hak Asasi Manusia di Columbia University. Ia juga menempuh pendidikan di fakultas Hukum Northwestern University Chicago dan

lulus di tahun 2002. Ia melanjutkan studi S3 di Universitas Diponegoro Semarang dan mendapatkan gelar Doktor Ilmu Hukum di tahun 2007.

Sejak itu juga, Ia bekerja sebagai pengacara di Human Right Watch divisi Asia pada tahun 1989-1991. Pulang dari negeri paman Sam, Ia mendirikan kantor hukum Artidjo Alkostar and Associates hingga kantor itu harus ditutup pada tahun 2000 karena dirinya diminta menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung RI. Empat belas (14) tahun menjadi Hakim Agung, Artidjo juga dipilih menjadi Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung sejak tahun 2014. Artidjo purnatugas dari Mahkamah Agung pada 22 Mei 2018 dan sudah menangani 19.483 perkara sepanjang karirnya.

### 3. Albertina Ho (Anggota Dewan Pengawas)

Albertina Ho lahir di Maluku Tenggara pada 1 Januari 1960. Ia menjadi sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada 1985 dan meraih gelar Magister Hukum di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada 2004. Usai lulus dari UGM, Albertina menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tahun 1986 sampai ditempatkan ke Pengadilan Negeri Slawi, Jawa Tengah pada 1991 hingga 1996. Setelah itu karirnya berlanjut ke Pengadilan Negeri Temanggung pada 2002-2002 dan melengkapi karirnya di Provinsi Jawa Tengah, Albertina























































